

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perempuan memiliki peran sentral dalam membangun fondasi sosial masyarakat. Sebagai pilar keluarga, perempuan bertanggung jawab atas pendidikan dan pengasuhan anak, hingga menjadi agen perubahan dalam menanamkan nilai-nilai moral, etika, dan budaya. Dalam lingkungan keluarga, perempuan memainkan peran sebagai pengelola emosi, perencana keuangan rumah tangga, serta penentu pola hidup sehat dan berkelanjutan (Trisdayanti & Kristiana, 2024). Peran ini sangat berpengaruh pada pembentukan karakter generasi penerus yang tangguh, kreatif, dan memiliki daya saing di era globalisasi. Di berbagai komunitas, perempuan sering kali menjadi tokoh kunci dalam membangun solidaritas sosial melalui kegiatan kemasyarakatan yang mendukung harmoni dan kesejahteraan bersama. (Rinaldi & Lumbaa, 2024).

Di sektor ekonomi, perempuan menjadi pekerja, hingga inovator dan pemimpin. Lewat keterlibatan perempuan dalam usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), perempuan menjadi penggerak ekonomi lokal yang berkontribusi signifikan pada produk domestik bruto (PDB) nasional (Bhegawati Dkk, 2022). Di sektor formal, perempuan semakin mengambil peran kepemimpinan, baik sebagai eksekutif, profesional, maupun pengambil kebijakan, yang berdampak positif pada keberagaman perspektif dalam pengambilan keputusan strategis. Kombinasi peran perempuan di ranah domestik dan publik menjadikan perempuan sebagai aktor

kunci dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang inklusif. (Fitriyah Dkk, 2022).

Sayangnya, di Indonesia hingga kini perempuan masih kerap menghadapi tantangan yang menghambat peran strategisnya dalam pembangunan. Kemiskinan menjadi salah satu masalah utama, terutama bagi perempuan yang menjadi kepala keluarga dan harus berjuang sendiri memenuhi kebutuhan hidup (Utomo & Haryani, 2019). Ketidaksetaraan gender juga masih menjadi hambatan besar, terlihat dari akses yang terbatas bagi perempuan dalam pendidikan, pekerjaan, dan pengambilan keputusan. Lalu kasus kekerasan seksual terhadap perempuan terus terjadi, menciptakan rasa tidak aman dan menghambat partisipasi aktifnya di berbagai bidang. Tantangan ini menunjukkan butuh sebuah upaya kolektif untuk memperjuangkan kesetaraan dan perlindungan hak-hak perempuan demi pembangunan yang inklusif. (Suprihatin & Azis, 2020).

Konsep gender sering kali dipahami sebagai perbedaan biologis antara laki-laki dan perempuan, tetapi pandangan ini terlalu sempit dan tidak mencakup kompleksitas identitas manusia. Gender seharusnya dipandang sebagai konstruksi sosial dan budaya yang berkembang seiring waktu dan dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk norma, nilai, dan praktik sosial dalam masyarakat. Dalam banyak budaya, peran gender ditentukan oleh harapan sosial yang mengatur bagaimana individu seharusnya berperilaku, berpakaian, dan berinteraksi berdasarkan jenis kelaminnya (Aini Dkk, 2024). Misalnya, dalam beberapa masyarakat, laki-laki diharapkan untuk menjadi pemimpin dan penyedia, sementara perempuan diharapkan untuk menjadi pengasuh dan pendukung. Konstruksi ini membatasi

individu dalam menjalani potensinya juga menciptakan ketidaksetaraan yang mendalam antara gender.

Kemudian wawasan akan gender sebagai konstruksi sosial membuka ruang untuk mengakui dan menghargai keragaman identitas gender yang ada. Banyak orang merasa bahwasanya identitasnya tidak sepenuhnya sesuai dengan kategori tradisional laki-laki atau perempuan; ia mungkin mengidentifikasi sebagai non-biner, genderqueer, atau transgender. Sehingga diperlukan untuk memahami bahwasanya gender bukanlah sesuatu yang tetap atau universal, melainkan dinamis dan bervariasi antar budaya dan waktu. Masyarakat yang mampu menerima dan merayakan keragaman ini cenderung lebih inklusif dan adil.

Sayangnya, hingga tulisan ini dibuat, diskriminasi gender masih menjadi hambatan global yang sulit diatasi, terutama di negara-negara berkembang. Ketidaksetaraan gender di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari pengaruh budaya patriarki yang telah mengakar kuat dalam struktur masyarakat. Perempuan sering kali menghadapi keterbatasan akses di berbagai sektor, mulai dari pendidikan hingga dunia kerja (Harahap & Jailani, 2024). Masih banyak perempuan yang tidak mendapatkan kesempatan yang setara untuk mengejar pendidikan tinggi, yang kemudian berimbas pada rendahnya partisipasinya di bidang-bidang strategis seperti sains, teknologi, dan kepemimpinan. Stereotip gender yang membatasi peran perempuan dalam ruang publik semakin memperkuat ketimpangan ini, membuat perempuan cenderung terpinggirkan dari proses pengambilan keputusan yang penting bagi pembangunan nasional. (Irawan Dkk, 2024).

Diskriminasi gender juga terlihat jelas dalam akses perempuan terhadap ekonomi. Di sektor formal, perempuan kerap menghadapi diskriminasi dalam bentuk upah yang lebih rendah dibandingkan laki-laki untuk pekerjaan yang sama. Di sektor informal, perempuan sering kali terjebak dalam pekerjaan yang rentan tanpa jaminan sosial maupun perlindungan hukum. Budaya patriarki juga membatasi perempuan untuk berpartisipasi secara aktif sebagai pengusaha atau pemimpin organisasi, karena perempuan kerap dianggap tidak mampu atau tidak pantas untuk memegang peran tersebut. Kondisi ini mencerminkan betapa mendesaknya perubahan sistemik untuk mendobrak norma-norma patriarki yang mengekang perempuan, agar perempuan dapat berkontribusi secara maksimal dalam pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

Tabel 1.1 Indeks Pemberdayaan Global Gender Gap Report 2023

Rank	Country	Score	Score change	Rank change
		0-1	2022	2022
74.	Thailand	0.711	+0.002	+5
75.	Ethiopia	0.711	+0.001	-1
76.	Georgia	0.708	-0.022	-21
77.	Kenya	0.708	-0.021	-20
78.	Uganda	0.706	-0.017	-17
79.	Italy	0.705	-0.015	-16
80.	Mongolia	0.704	-0.010	-10
81.	Dominican Republic	0.704	+0.001	+3
82.	Lesotho	0.702	+0.002	+5
83.	Israel	0.701	-0.026	-23
84.	Kyrgyzstan	0.700	-	+2
85.	Zambia	0.699	-0.025	-23
86.	Bosnia and Herzegovina	0.698	-0.012	-13
87.	Indonesia	0.697	+0.001	+5

Sumber: IBCWE (2023)

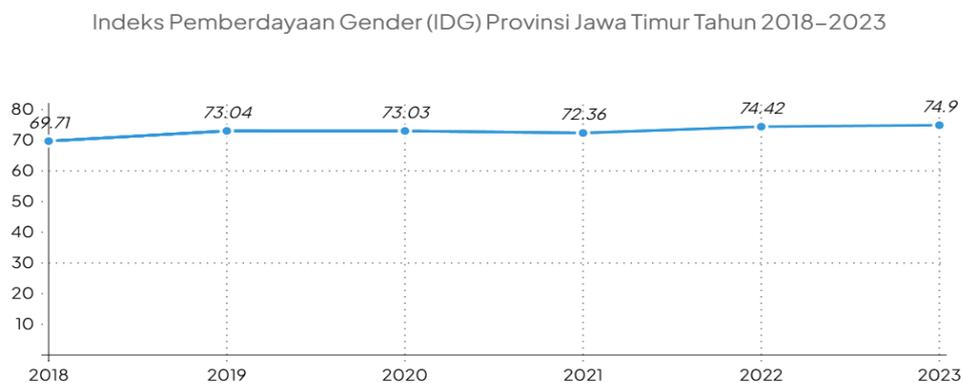
Peraturan Presiden No. 59 Tahun 2017 di Indonesia berfokus pada pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), khususnya dalam hal kesetaraan gender. Dalam konteks ini, indeks pemberdayaan gender nasional menunjukkan kemajuan yang signifikan, meskipun masih terdapat tantangan yang harus dihadapi. Menurut data Global Gender Gap Report 2023 indeks pemberdayaan gender Indonesia pada tahun 2023 mencapai 0,689, yang menunjukkan peningkatan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Tapi angka ini masih di bawah rata-rata negara-negara ASEAN lainnya, seperti Vietnam dan Thailand yang masing-masing memiliki indeks 0.711, (IBCWE, 2023)

Dalam perbandingan dengan negara-negara ASEAN, Indonesia masih menghadapi kesenjangan signifikan dalam berbagai aspek pemberdayaan gender. Misalnya, partisipasi perempuan dalam angkatan kerja di Indonesia hanya mencapai sekitar 54%, jauh lebih rendah dibandingkan dengan negara-negara seperti Vietnam dan Singapura yang masing-masing melaporkan angka partisipasi perempuan di atas 70%. Kemudian kesenjangan upah antara laki-laki dan perempuan di Indonesia mencapai 36% di sektor informal dan 20% di sektor formal, menunjukkan bahwasanya diskriminasi gender masih menjadi isu utama dalam dunia kerja. Meskipun ada kemajuan melalui kebijakan seperti Perpres No. 59 Tahun 2017, tantangan struktural dan budaya yang mendalam tetap menghambat pencapaian kesetaraan gender yang lebih baik di Indonesia. (IBCWE, 2024)

Mengingat pada Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 juga menekankan Tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren bahwa perempuan

berhak memenuhi memperoleh akses dan kontrol terhadap sumber daya, ekonomi, politik, sosial, budaya, agar perempuan dapat mengatur diri dan meningkatkan rasa percaya diri untuk mampu berperan dan berpartisipasi aktif dalam memecahkan masalah, sehingga mampu membangun kemampuan dan konsep diri.

Provinsi Jawa Timur, sebagai salah satu wilayah di Indonesia dengan dinamika sosial-ekonomi yang kompleks, juga menunjukkan adanya tantangan dan peluang dalam upaya pemberdayaan gender. Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Timur mencatat bahwasanya indeks pemberdayaan gender (IPG) di provinsi ini mencapai 74,42 pada tahun 2022, meningkat dibandingkan capaian tahun 2021 sebesar 72,36. Namun, meskipun ada tren peningkatan, angka tersebut masih berada di bawah rata-rata nasional yang mencapai 76,59 (BPS, 2024).



Gambar 1.1 Indeks Pemberdayaan Gender 2018-2023 Jawa Timur

Sumber : BPS Jawa Timur, 2023

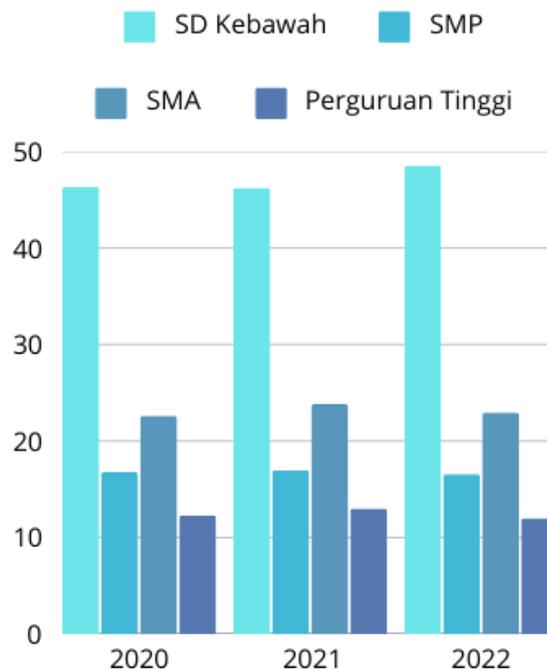
Hal ini menunjukkan bahwasanya meskipun upaya telah dilakukan, provinsi ini masih perlu bekerja keras untuk mengejar ketertinggalan dalam pemberdayaan gender, terutama dalam aspek partisipasi ekonomi dan kepemimpinan perempuan. Salah satu penyebab utama ialah rendahnya partisipasi perempuan dalam sektor

formal, terutama di bidang teknologi dan industri. Angka partisipasi perempuan dalam angkatan kerja di provinsi ini masih sekitar 48%, lebih rendah dibandingkan beberapa provinsi lain yang lebih maju, seperti DKI Jakarta atau Jawa Barat. Kemudian kesenjangan pendidikan antara laki-laki dan perempuan di pedesaan Jawa Timur turut memengaruhi tingkat keterwakilan perempuan di sektor ekonomi formal dan informal.

Perempuan rentan di Jawa Timur menghadapi tantangan yang lebih besar dalam pemberdayaan dan pemenuhan hak-haknya. Kelompok ini meliputi kepala keluarga perempuan, pekerja di sektor informal seperti pengemudi ojek online, dan perempuan yang menjadi korban kekerasan berbasis gender. Kepala keluarga perempuan, yang jumlahnya terus meningkat di provinsi ini, sering kali harus berjuang keras untuk memenuhi kebutuhan keluarga sambil menghadapi keterbatasan akses ke peluang ekonomi yang layak. Di sisi lain, perempuan yang bekerja sebagai pengemudi ojek online kerap menghadapi risiko keselamatan dan ketidakpastian pendapatan, mencerminkan kurangnya perlindungan dan regulasi yang mendukung pekerja informal. (Rahmawati & Hidayah, 2020).

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Jawa timur mencatat selama periode 2020-2022, hampir separuh dari perempuan yang bekerja berpendidikan SD ke bawah. Selain itu, selama periode tersebut, perempuan bekerja dengan pendidikan SD ke bawah juga memiliki persentase tertinggi dibandingkan dengan yang lainnya. Di tahun 2020 sebesar 48,34%, sementara di tahun 2021 sebesar 46,24% dan di tahun 2022 sebesar 48,50%. Dan di tahun 2022, perempuan yang bekerja

berpendidikan SMP adalah sebesar 16,55%, SMA sebesar 22,94%, dan Perguruan Tinggi sebesar 12,01%. (BPS Jatim, 2023)



Gambar 1.2 Persentase Perempuan yang bekerja menurut Pendidikan

Sumber : BPS Jawa Timur 2023

Melalui data tersebut tingginya presentase perempuan yang bekerja yang masih berpendidikan SD kebawah dan pekerjaan yang dipermasalahkan oleh perempuan dengan pendidikan SD ke bawah cenderung tidak banyak memiliki *skill* atau keterampilan yang bisa dipilih sehingga apapun jenis pekerjaannya tentu akan diambil kesempatan untuk bekerja. dan seperti yang dikatakan oleh Bapak Zulkipli sebagai Kepala Badan Pusat Statistik pentingnya pendidikan sebagai modal untuk memperoleh pekerjaan melalui Laporan Profil Angkatan Kerja Perempuan Provinsi

Jawa Timur 2022. yang dimuat oleh *kominfo.jatimprov.go.id* diungkapkan sebagai berikut:

Kominfo.jatimprov.go.id– “Pendidikan merupakan modal untuk memperoleh pekerjaan dan kehidupan yang layak di masa depan. Dengan pendidikan tersebut diharapkan dapat meningkatkan daya saing di pasar tenaga kerja sehingga bisa mendapatkan upah yang layak,” ujar Kepala BPS Jatim, Zulkipli melalui Laporan Profil Angkatan Kerja Perempuan Provinsi Jawa Timur 2022.

Sumber : (<https://kominfo.jatimprov.go.id/berita/bps-jatim-catat-persentase-perempuan-yang-bekerja-menurut-pendidikan> , diakses 12 Desember 2024)

Oleh karena itu, pentingnya meningkatkan kemampuan yang lebih baik, dengan membutuhkan keterampilan (*skill*) yang lebih baik. Peningkatan kualitas tenaga kerja ini hendaknya diimbangi dengan ketersediaan kesempatan kerja bagi tenaga kerja berpendidikan tinggi tersebut.

Dalam upaya untuk mengatasi berbagai tantangan ini, Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang menekankan pentingnya pengarusutamaan gender dalam pembangunan daerah, yang bertujuan untuk memastikan bahwasanya perempuan, termasuk kelompok rentan, mendapatkan akses yang setara ke layanan publik, pelatihan keterampilan, dan dukungan ekonomi. Dan mendorong perlindungan bagi korban kekerasan berbasis gender melalui peningkatan kapasitas lembaga perlindungan perempuan dan anak. Tapi implementasi kebijakan ini masih memerlukan pengawasan yang lebih ketat dan dukungan sinergis antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta agar dapat memberikan dampak yang nyata bagi pemberdayaan perempuan rentan di Jawa Timur.

Permasalahan perempuan rentan tersebut menjadi perhatian pemerintah Jawa Timur. Gubernur Khofifah Iskandar, melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Kependudukan (DP3AK), meluncurkan

program Pusat Pembelajaran Pemberdayaan Perempuan (PUTARAN). Program ini, berdasarkan SK No. 188/78/Kep/109.2/2023, ditujukan untuk perempuan rentan seperti pengemudi ojek online (GASPOL), korban kekerasan seksual, dan kepala keluarga perempuan. (Syahputr & Santoso, 2022).

Program PUTARAN yang diluncurkan oleh DP3AK Provinsi Jawa Timur merupakan sebuah inisiatif penting dalam rangka pemberdayaan perempuan rentan di Provinsi Jawa Timur. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas perempuan dalam berbagai bidang salah satunya dibidang ekonomi, dengan fokus utama pada kelompok perempuan yang berada dalam situasi rentan, seperti perempuan yang berpenghasilan rendah, dan perempuan kepala keluarga. Dalam pelaksanaannya, PUTARAN melibatkan pemerintah daerah hingga menggandeng berbagai pihak terkait, baik dari instansi pemerintah lainnya maupun sektor non-pemerintah, Program ini diharapkan mampu menjadi wadah bagi perempuan untuk mengembangkan pengetahuan, keterampilan, dan pemahaman yang dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas hidupnya, serta berperan aktif dalam perubahan sosial yang lebih besar.

Program PUTARAN memiliki tujuan yang jelas dalam meningkatkan kapasitas perempuan melalui beberapa pelatihan dan pendampingan salah satunya dibidang ekonomi, dengan tujuan khusus dari program ini ialah untuk mendorong perempuan supaya perempuan rentan bisa mengembangkan keterampilan untuk meningkatkan pendapatannya. Diantaranya ialah pelatihan memasak yang dilaksanakan sebanyak 2 kali dengan 20 peserta yang diajarkan oleh para ahli dari Master Chef, pelatihan merias dan kecantikan yang diadakan sebanyak 4 kali

dengan dukungan dari PT. Vitaparm, LPKD, dan Ester Clinic, serta pelatihan kerajinan tangan yang berlangsung 2 kali dengan peserta 20 orang yang difasilitasi oleh Forum PUSPA.

Pada Pelatihan *Cooking Class* yang dilaksanakan sebanyak 2 kali dengan 20 peserta dari kalangan perempuan rentan. Pada pelatihan ini dipandu oleh para ahli dari Master Chef yang memberikan wawasan dan keterampilan dalam bidang kuliner, yang dapat dimanfaatkan oleh peserta untuk membuka usaha sendiri atau meningkatkan kemampuan memasak yang berguna dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga, pelatihan ini memberi peluang bagi perempuan untuk memanfaatkan keterampilan memasak sebagai salah satu sumber penghasilan yang dapat memberikan kestabilan ekonomi.

Selain pelatihan memasak, program PUTARAN menawarkan pelatihan *Beauty Class* yang diselenggarakan sebanyak 4 kali, dengan 20 peserta per sesi. Peserta tersebut dari kalangan perempuan rentan. Pada Pelatihan ini didukung oleh PT. Vitaparm, LPKD, dan Ester Clinic, dan bertujuan untuk memperkenalkan teknik merias wajah dan perawatan kecantikan yang dapat membantu perempuan dalam meningkatkan penampilannya sekaligus membuka peluang usaha di bidang kecantikan. Mengingat makin berkembangnya industri kecantikan, pelatihan ini memberikan keterampilan praktis yang memungkinkan peserta untuk bekerja di salon kecantikan atau bahkan memulai usaha kecantikan secara mandiri di mana itu meningkatkan kemandirian ekonomi peserta, hingga meningkatkan rasa percaya dirinya.

Pelatihan lainnya yang diselenggarakan oleh Program PUTARAN ialah pelatihan kerajinan tangan atau *Handicraft*, yang dilaksanakan sebanyak 2 kali dengan 20 peserta pada setiap sesi. Peserta pada pelatihan ini dari kalangan perempuan rentan. Dalam pelatihan kerajinan tangan Forum PUSPA menjadi fasilitator utama dalam pelatihan ini, yang bertujuan untuk mengajarkan keterampilan dalam membuat produk kerajinan tangan yang memiliki nilai jual. Pelatihan ini sangat relevan bagi perempuan yang ingin mengeksplorasi kreativitasnya sekaligus menghasilkan pendapatan tambahan. Adanya berbagai produk kerajinan tangan seperti bucket bunga atau produk dekoratif lainnya, peserta dapat memperluas pasarnya dan berpartisipasi dalam ekonomi kreatif. Pelatihan ini memberikan keterampilan praktis hingga membuka peluang untuk memperkenalkan karyanya kepada pasar yang lebih luas, yang dapat memperkuat kemandirian ekonomi perempuan rentan.

Semua kegiatan dalam program PUTARAN, dibiayai melalui DPA Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur. Program ini mendapatkan bantuan teknis sukarela dari berbagai pihak yang mendukung, baik dari lembaga pendidikan, organisasi, maupun perusahaan yang berkomitmen dalam pemberdayaan perempuan dan peningkatan kualitas hidup kelompok perempuan rentan.

Berdasarkan permasalahan yang dihadapi oleh perempuan rentan di Jawa Timur, seperti rendahnya partisipasi perempuan dalam angkatan kerja dan kesenjangan upah antara laki-laki dan perempuan, program PUTARAN menjadi salah satu langkah strategis yang dapat membantu mengurangi ketimpangan ini.

Dengan adanya pelatihan perempuan yang tergabung dalam kelompok rentan, seperti pengemudi ojek online, korban kekerasan berbasis gender, dan kepala keluarga perempuan, diberikan peluang untuk meningkatkan keterampilan yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja dan sektor ekonomi. Salah satu tantangan utama ialah mengurangi ketergantungan pada pekerjaan informal dengan menyediakan keterampilan yang menjadikannya bisa memasuki sektor formal atau membuka usaha mandiri. Program pelatihan seperti *Cooking Class*, *Beauty Class*, dan *Handcraft* memberikan landasan yang kuat bagi perempuan untuk menciptakan sumber penghasilan yang lebih stabil dan berkelanjutan.

Pemberdayaan perempuan melalui program PUTARAN di UPT PPA DP3AK Provinsi Jawa Timur bertujuan meningkatkan kesetaraan gender dan perekonomian dengan mengoptimalkan potensi diri perempuan rentan. Berdasarkan konsep pemberdayaan Ambar Teguh Sulistyani (2004), langkah-langkah pemberdayaan dimulai dengan Tahap Kesadaran, yang membangun kesadaran diri tentang pentingnya pengembangan kemampuan untuk menghadapi tantangan. Selanjutnya, Tahap Transfer Pengetahuan dan Keterampilan memberikan keterampilan dasar untuk berkontribusi dalam pembangunan. Terakhir, Tahap Pengembangan Intelektual dan Kreativitas mengasah kemampuan berpikir kritis dan inovatif, yang memperkuat kemandirian dan inisiatif dalam menciptakan solusi kreatif di berbagai aspek kehidupan.

Sehingga, penulis tertarik untuk meneliti lebih dalam terkait pemberdayaan perempuan melalui program Pusat Pembelajaran Pemberdayaan Perempuan (PUTARAN) di UPT PPA DP3AK Provinsi Jawa Timur, dengan fokus

pemberdayaan perempuan melalui Program PUTARAN yang mencakup pelatihan keterampilan seperti *Cooking Class*, *Beauty Class*, dan *Handicraft* yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas ekonomi perempuan rentan. Alasan penulis memilih fokus ini ialah karena pemberdayaan perempuan merupakan aspek krusial dalam mencapai kesetaraan gender, yang dapat mengurangi ketimpangan ekonomi antara laki-laki dan perempuan. Kemudian keterampilan yang diperoleh dari pelatihan tersebut dapat membuka peluang usaha baru bagi perempuan, meningkatkan kemandirian finansial, dan memberikan dampak positif bagi kesejahteraan keluarga.

Kajian ini akan penulis lakukan sebab didorong oleh kondisi sosial-ekonomi di Jawa Timur, yang menunjukkan kesenjangan antara partisipasi perempuan dalam angkatan kerja dan akses terhadap kesempatan ekonomi, terutama di sektor formal. Analisa terhadap Program PUTARAN di bidang ekonomi, akan bisa melihat sejauh mana pelatihan yang diberikan benar-benar memberikan manfaat konkret bagi perempuan rentan, serta keefektifan programnya dalam membuka peluang usaha atau meningkatkan kemampuan bekerja. Tahap peningkatan kemampuan intelektual ini diperlukan agar program yang serupa di masa depan dapat lebih optimal dan memberikan dampak yang lebih besar dalam pemberdayaan perempuan di wilayah tersebut. Maka dari itu, penulis melakukan penelitian lebih dalam dan berjudul **"Pemberdayaan Perempuan Melalui Program Pusat Pembelajaran Pemberdayaan Perempuan di UPT PPA Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Jawa Timur "**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, permasalahan yang bisa diambil dalam penelitian ini yakni bagaimana pemberdayaan perempuan melalui Program Pusat Pembelajaran Pemberdayaan Perempuan di Kota Surabaya.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah diatas, Penelitian ini ditujukan guna mendeskripsikan pemberdayaan perempuan melalui Program Pusat Pembelajaran Pemberdayaan Perempuan di Kota Surabaya.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian terkait pemberdayaan perempuan melalui program Pusat Pembelajaran Pemberdayaan Perempuan (PUTARAN) di Kota Surabaya diharapkan bisa memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, sebagai berikut :

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan bisa memberi penjelasan teori yang berkaitan dengan pemberdayaan perempuan melalui program Pusat Pembelajaran Pemberdayaan Perempuan (PUTARAN) di Kota Surabaya .

1.4.2 Manfaat Praktis

- Bagi Penulis :

Sebagai syarat memperoleh gelar sarjana pada program studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

- Bagi Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

Hasil penelitian ini dapat menjadi sumber bacaan dan referensi baru di perpustakaan sebagai sumber bacaan dan referensi baru di perpustakaan sebagai dasar pemikiran bagi kemungkinan adanya sebuah penelitian sejenis dimasa yang akan datang.

- Bagi DP3AK Provinsi Jawa Timur

Penelitian ini dapat memberikan insight atau gambaran tentang tantangan dan peluang dalam pelaksanaan program PUTARAN, sehingga DP3AK dapat menyusun strategi yang lebih baik dalam menjangkau serta melayani perempuan yang membutuhkan.